

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pernyataan Megawati: “Pak Jokowi Kalau *nggak* Ada PDI Perjuangan *duh* Kasihan *dah*”

Putri Paradilah Sandi^a, Mayasari^b, Eka Yusup^c

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

^aputriparadilahsandi@gmail.com, ^bmayasari@fisip.unsika.ac.id, ^ceka.yusup@fisip.unsika.ac.id

Submitted: 05-07-2024, Reviewed: 07-07-2024, Accepted: 11-07-2024

Abstract

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) held its 50th Anniversary celebration on January 10, 2023. During the celebration, Megawati as the Chairperson of the party mentioned, "Mr. Jokowi, if there is no PDI Perjuangan, I'm sorry.". The statement received applause from the audience at JIEXPO Kemayoran. The video of Megawati's statement was uploaded again by KompasTV through the Youtube channel and received various responses. This research uses a qualitative research method with a critical discourse analysis approach of the Norman Fairclough model. The purpose of this research is to dissect discourse in three dimensions, namely textual, discourse practices, and sociocultural practices. Textually, the use of linguistic elements in the form of diction and *majas* is found. The dimension of discourse practice can be seen from the parties involved in making the video from KompasTV media through the Youtube channel. The level of consumption of this discourse is not only consumed by subscribers, but the wider netizen can access the information and provide comments. The sociocultural dimension is divided into three, namely situational, institutional, and social. Situational saw the situation when Megawati's 50th anniversary of PDIP received a response of applause when delivering the discourse. Institutional shows that PDIP's vote share has decreased in the 2024 elections. Then the social level in the discourse consists of cultural and political elements.

Keywords: Jokowi, Megawati, PDIP, Critical Discourse Analysis, Norman fairclough

Abstrak

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-50 pada 10 Januari 2023. Saat perayaan tersebut, Megawati selaku Ketua Umum partai menyinggung, “Pak Jokowi kalau *nggak* ada PDI Perjuangan *duh* kasihan *dah*.”. Pernyataan tersebut mendapat tepuk audiens yang berada di JIEXPO Kemayoran. Video pernyataan Megawati tersebut diunggah kembali oleh KompasTV melalui kanal Youtube dan mendapat beragam respon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Maksud dari penelitian ini untuk membedah wacana dalam tiga dimensi, yaitu tekstual, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Secara tekstual, ditemukan penggunaan unsur kebahasaan berupa diksi dan *majas*. Dimensi praktik wacana terlihat dari pihak yang terlibat dalam pembuatan video tersebut dari media KompasTV melalui kanal Youtube. Tingkat konsumsi wacana ini tidak hanya dikonsumsi oleh *subscriber* saja, namun warganet luas dapat mengakses informasi tersebut dan memberikan komentar. Dimensi sosiokultural terbagi menjadi tiga, yaitu situasional, institusional, dan sosial. Situasional melihat situasi saat HUT ke-50 PDIP Megawati mendapat respon tepuk tangan saat menyampaikan wacana tersebut. Institusional menunjukkan perolehan suara PDIP mengalami penurunan pada Pemilu 2024. Kemudian level sosial dalam wacana tersebut terdiri dari unsur kebudayaan dan politik.

Kata Kunci: Jokowi, Megawati, PDIP, Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan tahun berdirinya ke-50 pada 10 Januari 2023 lalu. Menyambut ulang tahun, partai ini mengadakan acara perayaan yang digelar di JIEXPO Kemayoran. Turut hadir dalam perayaan tersebut Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Hadir pula Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia dan salah satu kader PDIP.

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum partai menyampaikan pidato di hadapan para hadirin. Perayaan ini tidak hanya dilakukan secara *offline* atau luar jaringan (*luring*), namun juga dilakukan secara *online* atau dalam jaringan (*daring*) melalui *live streaming Youtube* PDIP. Dalam pidato sambutannya, Megawati mengatakan, “Pak Jokowi kalau *enggak* ada PDI Perjuangan *aduh* kasihan *dah*.”. Kemudian potongan pidato Megawati tersebut diunggah dalam kanal Youtube KompasTV dengan judul “Megawati: Pak Jokowi Kalau *Nggak* Ada PDIP, *Duh* Kasihan *Dah*” yang berdurasi 2 menit 35 detik.

Perkataan Megawati tersebut mendapat reaksi tepuk tangan dari para audiens yang hadir. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tampak tersenyum menanggapi ucapan Megawati tersebut. Wacana dari pernyataan Megawati pada saat HUT ke-50 PDIP yang diunggah melalui Youtube KompasTV tersebut menuai banyak komentar warganet.

Roger Fowler (Eriyanto, 2011) mengatakan bahwa wacana terbentuk dalam komunikasi lisan atau tulisan yang mencerminkan kepercayaan, nilai, dan kategori yang terkandung di dalamnya. Kepercayaan di sini

mencakup pandangan dunia dan merupakan representasi dari pengalaman yang dialami masyarakat. Dalam analisis wacana kritis, Fairclough dan Wodak melihat wacana dalam perkataan atau tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Wacana dapat digambarkan sebagai praktik sosial yang saling memengaruhi dan dibentuk oleh situasi, institusi, dan struktur sosial, yang kemudian menghasilkan peristiwa diskursif tertentu. Melalui wacana efek ideologi dapat ditampilkan, sehingga dapat terlihat ketimpangan di masyarakat.

Analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (Mayasari & Nani Darmayanti, 2019) akan membedah dan menganalisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu tekstual, praktik kewacanaan (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*). Analisis ini dapat mengungkapkan struktur kekuasaan yang tertanam dalam bahasa dan bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan atau mengubah relasi sosial.

Penelitian analisis wacana kritis Norman Fairclough tentang pernyataan Megawati dalam HUT ke-50 PDIP yang dimuat dalam kanal *Youtube KompasTV*, peneliti akan meneliti wacana tersebut dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Dalam video tersebut tidak memuat pidato Megawati dalam perayaan HUT ke-50 PDIP secara keseluruhan, namun sudah melalui proses penyuntingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2009) kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian dengan hasil berupa data deskriptif yang berisi kata-kata tertulis atau lisan dari orang maupun perilaku yang diamati dalam penelitian. Analisis wacana kritis model Norman Fairclough seringkali disebut model tiga dimensi, yaitu *text* (mikro), *discourse practice* (meso), dan *sociocultural practice* (makro).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu menggunakan dokumentasi studi Pustaka. Dalam penelitian ini data yang berupa dokumentasi berupa video sambutan atau pidato Megawati di perayaan HUT ke-50 PDIP. Studi pustaka menjadi metode pengumpulan data dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, artikel berita, penelitian terdahulu, dan sebagainya. Analisis wacana kritis Norman Fairclough mempunyai tiga langkah utama dalam menganalisis suatu wacana. Langkah awal dalam analisis wacana kritis model Norman Fairclough adalah mendeskripsikan (*description*) dari struktur linguistik di dalam teks. Kemudian struktur linguistik teks tersebut diinterpretasikan (*interpretation*) dengan hubungan antara proses produksi dan interpretasi teks. Selanjutnya, hasil interpretasi dijelaskan (*explanation*) hubungannya antara proses produksi dan interpretasi teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pada tingkat mikro atau tekstual akan menganalisis wacana secara linguistik dengan melihat diksi, majas, dan sebagainya. Kemudian pada analisis pada tingkat meso atau praktik diskursif akan melihat proses produksi dan konsumsi wacana yang berkaitan dengan media. Analisis pada tingkat makro atau praktik sosiokultural yang akan melihat wacana dalam konteks situasional, intitusional, dan sosial.

A. Dimensi Tekstual

a) Diksi “Saya” atau “Aku”

Pihak yang paling utama yang paling sering muncul atau disebut dalam sebuah wacana dapat menjadi aktor atau pelaku (Mayasari et al., 2012) Aktor utama dalam wacana tersebut adalah Megawati Soekarno Poetri selaku pengirim pesan dan menyebut dirinya menggunakan "Saya" dan "Aku".

- 1) “Mbok **saya** dikasih bintang toh yo ...”
- 2) “**Saya** bilang sama Pak Ma’ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menkopolkam”
- 3) “**Aku** tadinya bosnya mereka, eh tiba-tiba diambil...”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1234). Saya atau Aku merupakan pronominal yang mempunyai arti orang yang berbicara atau menulis. Dengan demikian Saya dan Aku dalam wacana ini merupakan kata ganti untuk Megawati. Pada data (2) sampai dengan (3) kalimat yang disampaikan Megawati ditujukan pada peserta yang hadir di HUT ke-50 PDIP. Sedangkan pada data (1) Megawati secara khusus menunjukan pada Presiden Jokowi. Ini ditunjukkan dari kalimat sebelumnya yang menyebut nama Jokowi, “eh PDIP menggalakkan program stunting lho Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo...”.

Megawati memberikan pidato sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan mengundang Presiden Joko Widodo sebagai tamu undangan sekaligus kader partai PDI Perjuangan. Penggunaan diksi Saya dan Aku pada data (2) dan (3), sebagai penegas bahwa Megawati turut andil dalam pencalonan Presiden Jokowi hingga di periode kedua masa kepemimpinannya. Peran Megawati dalam pencalonan tersebut sebagai ketua umum partai pengusung utama dari Presiden Jokowi.

b) Majas Ironi

Ironi dalam wacana tersebut yaitu terdapat pada klausa “kasihan” dan “nggak cari kuasa”

- 1) “Padahal Pak Jokowi kalau *nggak* ada PDI Perjuangan aduh **kasihan** dah.”
- 2) “*Lha* aku kok *ora dijupuk yo*. *Lho* kan mestinya *katutno* aku, *enggak*. Tetap saja BPIP. *Yo, yo* sudah, kan saya **nggak cari kuasa**, tahu *nggak*, hmm.”

Penggunaan ironi bertujuan untuk menyatakan sindiran. Istilah ironi menggambarkan apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin diungkapkan (Eriyanto, 2011)

Berdasarkan KBBI (2008:631) kasihan memiliki arti rasa iba atau rasa belas kasih. Kasihan digunakan untuk menyatakan perasaan simpati. Data (1) menunjukkan rasa kasihan Megawati kepada Jokowi bila tanpa PDI Perjuangan. Ini mengartikan bahwa Megawati merasa PDI Perjuangan mempunyai peran besar dalam karir politik Jokowi. Sehingga Megawati mengingatkan pada Jokowi tentang peran Megawati dan PDI Perjuangan terhadap karir politiknya dengan menyindir Jokowi melalui kata “kasihan”.

Pernyataan Megawati pada data (2) ditujukan untuk Pak Jokowi yang hadir dalam HUT ke-50 PDIP tersebut. Pernyataan tersebut merupakan bentuk kecewa Megawati yang tidak mendapat jabatan dari Jokowi selain menjadi Ketua Dewan BPIP karena sebelumnya terdapat kalimat, “aku kok *ora dijupuk yo*”. Dari kalimat yang diungkapkan tersebut menunjukkan bahwa Megawati berharap “diambil” untuk mendapatkan jabatan penting dari Jokowi.

Megawati saat ini menjabat sebagai Ketua Umum partai PDI Perjuangan dengan suara 19,33% dan menjadikan partai ini sebagai partai yang mendapat perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2019. Partai politik di Indonesia mempunyai peran dalam pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11, salah satu fungsi partai politik yaitu “Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” (DPR RI, 2008). Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, partai politik mempunyai posisi penting dalam pemerintahan. Maka ketua umum suatu partai politik termasuk dalam jabatan yang mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan, termasuk menentukan calon presiden dan perangkat pemerintahan lainnya.

B. Dimensi Praktik Wacana

a) Produksi Teks

Analisis pada proses produksi teks melibatkan pihak yang terlibat dalam produksi suatu teks atau wacana. *KompasTV* menjadi salah satu media yang menyiarkan secara langsung HUT PDI Perjuangan ke-50 melalui kanal *Youtube*. Kemudian *KompasTV* mengunggah kembali potongan video pernyataan Megawati mengenai “Jokowi kalau *nggak* ada PDI Perjuangan, *duh kasihan dah*.” dengan durasi 2 menit 35 detik.

KompasTV termasuk dalam lembaga pers. Pers adalah sebuah institusi sosial dan medium komunikasi massa yang melaksanakan aktivitas jurnalistik, termasuk dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Informasi dapat berupa teks, suara, gambar, video, data, grafik, dan bentuk lainnya, yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai saluran lainnya (Ardesaputra & Defhany, 2024). Dalam menyampaikan informasi, pers tidak boleh sembarangan, melainkan harus mengikuti panduan yang diatur dalam kode etik jurnalistik yang diatur oleh Dewan Pers.

Independensi media menjadi bagian dari kode etik jurnalistik. Maka media harus menaatinya, sehingga media dapat dipercaya oleh masyarakat. Sesuai dengan kode etik tersebut, *KompasTV* mempunyai slogan “Independen Terpercaya”. Berdasarkan daftar media terverifikasi Dewan Pers, *KompasTV* berstatus terverifikasi dan faktual. Ini menunjukkan bahwa *KompasTV* menyajikan berita yang faktual dan dapat dipercaya sesuai dengan slogan *KompasTV* itu sendiri. Menurut *databoks* (Annur, 2023). *Reuters Institute* melaporkan dalam *Digital News Report 2023* media massa yang paling dipercaya di Indonesia adalah *Kompas* yang mana merupakan satu naungan dengan *KompasTV*. Dalam survei tersebut, 69% dari responden menyatakan kepercayaan mereka pada media yang didirikan oleh P. K. Ojong dan Jakob Oetama tersebut. Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat Indonesia terhadap sumber berita utama dan sejauh mana mereka memercayai informasi yang disajikan oleh media tertentu. Selain itu, survei ini juga menunjukkan bahwa 65% masyarakat menyukai media sosial sebagai sumber berita. Sehingga penyebaran berita melalui media sosial dapat membuat jangkauan berita tersebut menjadi semakin luas.

b) Penyebaran Teks

Pernyataan Megawati diunggah dalam kanal *Youtube KompasTV* dan disebarkan kembali melalui X oleh *Kompas.com* yang merupakan media dalam satu naungan *Kompas Gramedia Group*. Pengunggahan video tersebut tak lama setelah siaran langsung HUT ke-50 PDIP berakhir, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023.

Video pernyataan Megawati mengenai Jokowi jika tidak ada PDIP merupakan potongan atau penggalan video dari pidatonya saat menghadiri acara HUT ke-50 PDIP. Potongan video tersebut sudah melalui proses edit dengan memotong pernyataan Megawati dari keseluruhan pidatonya. Meski demikian, video tersebut tidak

mengedit atau memotong isi pernyataan Megawati dan mengemasnya dalam satu topik dalam satu video, yaitu pernyataan Megawati yang merasa kasihan kepada Jokowi bila tanpa PDIP.

c) **Konsumsi Teks**

Level konsumsi teks akan menganalisis sasaran atau penerima dari wacana tersebut (Mayasari & Nani Darmayanti, 2019). Analisis melibatkan pemahaman rinci tentang cara partisipan membuat dan memaknai suatu teks. Di sini, analisis percakapan dan pragmatik menjadi lebih dominan dalam mengungkapkan momen-momen spesifik dalam interaksi verbal.

Video dengan judul “Megawati: Pak Jokowi Kalau Nggak Ada PDIP, Duh Kasihan Dah” di kanal *Youtube KompasTV*. Video ini ditujukan kepada masyarakat luas khususnya yang berlangganan atau *subscribe* dengan akun *KompasTV* atau *followers X @kompascom*. Selain itu berita ini juga ditujukan untuk masyarakat yang mengikuti berita mengenai Megawati, Jokowi, PDIP, dan yang mengikuti berita politik. Penggunaan media sosial membuat masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi tersebut. Media sosial memungkinkan manusia untuk mengakses informasi sepanjang waktu selama terhubung dengan internet, sehingga menciptakan interaksi yang berkelanjutan antara individu di dunia maya (Lestari et al., 2022). Hingga 20 Januari 2024, video tersebut telah ditonton sebanyak 39 ribu kali dengan total suka atau *like* sebanyak 239 dan terdapat 245 komentar.

C. **Dimensi Praktik Sosiokultural**

a) **Situasional**

Sebuah teks dibuat dalam kondisi atau suasana yang khas dan unik. Aspek situasional dalam level sosiokultural melihat suatu konteks peristiwa yang terjadi (Mayasari & Nani Darmayanti, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Megawati menyatakan, “... Pak Jokowi kalau *nggak* ada PDI perjuangan *aduh* kasihan *dah*.” Dalam perayaan HUT ke-50 PDIP yang dirayakan di JIEXPO Kemayoran. Acara ini dihadiri oleh kader PDIP dan hanya internal PDIP saja. Pernyataan Perayaan ini juga disiarkan secara langsung di kanal Youtube PDI Perjuangan dan beberapa media di Indonesia. Pernyataan Megawati kemudian dijadikan bahan berita oleh berbagai media, salah satunya *KompasTV*. Sebagai salah satu media yang aktual, *KompasTV* memberitakan pernyataan tersebut dengan mengunggah potongan video melalui kanal *Youtube*.

Pernyataan Megawati tersebut mendapat respon tepuk tangan dari audiens. Sementara itu, Jokowi terlihat menanggapi hal tersebut dengan tersenyum. Sebelumnya, Megawati juga pernah menyebut Jokowi sebagai “petugas partai” (Wismabrata, 2014) Sebutan petugas partai menunjukkan bahwa Jokowi bertugas untuk partai. Banyak yang berspekulasi bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi harus menuruti keinginan partai. Panggilan ini juga menunjukkan bahwa meskipun Jokowi menjabat sebagai Presiden, Ia tetap di bawah naungan partai PDI Perjuangan dengan Megawati sebagai Ketua Umum partai tersebut. Namun, Megawati membantah hal tersebut (Farisa, 2024a). Ia menyebutkan bahwa meski kadernya merupakan “petugas partai” yang harus menjalankan tugas, namun saat pengambilan keputusan tetap di tangan kader yang menjabat di pemerintahan, misalnya Presiden, Gubernur, dan Walikota.

Hubungan keduanya terlihat naik dan turun sejak 2015 silam, bermula dari penunjukan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang tidak sesuai dengan keinginan PDIP. Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan menunjuk Badrodin Haiti sebagai gantinya. Di tahun yang sama, Megawati mengkritik proyek kereta cepat yang dijalankan Jokowi. Menurutnya, proyek ini lebih tepat diterapkan di kawasan timur Indonesia. Kemudian di awal pemerintahan Jokowi periode kedua, tepatnya pada Agustus 2019, Megawati meminta kepada Jokowi untuk menambah kursi menteri bagi PDIP setelah sebelumnya partai ini hanya mendapat jatah empat kursi. Munculnya gagasan mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebut mendapat dukungan dari Istana disebut mendapat penolakan dari Megawati. Kemudian pada Mei 2022 Jokowi disinyalir mendukung Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) di Pemilu 2024 pada saat Rapat Kerja Nasional Projo. Dukungan Jokowi ini dinilai mendahului Megawati yang merupakan Ketua Umum partai (Dongoran, 2023).

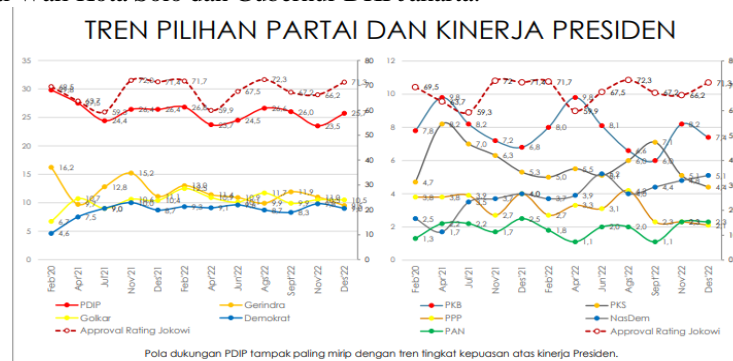
Memasuki tahun Pemilu, anak Jokowi, Kaesang Pangarep diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 25 September 2023 Di acara Kopi Darat Nasional PSI. Saat ditanyai wartawan, Jokowi mengungkapkan merestui anaknya menjadi Ketua Umum partai tersebut (Ramadhan & Setuningsih, 2023). Situasi kian memanas setelah pada 25 Oktober 2023, anak pertama Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Prabowo Subianto. Keduanya diusung beberapa partai, salah satunya partai yang diketuai oleh Kaesang, yaitu PSI.

Jokowi menunjukkan gelagat yang lebih condong pada paslon rival PDIP dan membuat publik berasumsi dirinya bukan lagi kader partai tersebut. Namun kabar tersebut ditampik oleh Puan Maharani. Meski demikian, pada masa kampanye, Jokowi yang masih menjadi kader partai PDIP tersebut diberitakan ingin menemui Megawati melalui Sri Sultan Hamengkubuwono X (Aditya & Ihsanudin, 2024). Berita ini semakin memperjelas hubungan keduanya yang kian tidak harmonis.

Berbeda dengan periode sebelumnya, PDIP kini terlihat lebih sering mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kritik terhadap rencana diberlakukannya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kritik keputusan MA terkait batas usia calon Gubernur, dan kritikan terhadap landasan pemikiran RAPBN tahun 2025. Tak hanya mengkritik, saat ditanyai mengenai hubungan Megawati dengan Jokowi, Hasto menyebutkan bahwa Megawati hanya berhubungan baik dengan tokoh yang mengemban amanah konstitusi (Syarifudin, 2024). Pernyataan Hasto tersebut semakin menunjukkan bahwa hubungan Jokowi dan Megawati sedang tidak baik.

b) Institusional

Analisis secara institusional melihat bagaimana institusi dapat memengaruhi terbentuknya wacana. PDI Perjuangan sebagai partai yang diketuai oleh Megawati dan menanungi Jokowi. Partai ini yang mencalonkan Jokowi sebagai Presiden selama 2 periode. Sebelumnya PDIP juga menjadi partai pengusung Jokowi dalam pencalonannya sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.



Gambar 1. Survei Elektabilitas Partai dan Kepuasan Kinerja Presiden (Sumber: <https://indikator.co.id/rilis-indikator-04-januari-2023/>)

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan PDIP sebagai partai pengusungnya berpengaruh pada elektabilitas partai ini yang mengalami naik turun. Survei Indikator yang dilakukan pada 1-6 Desember 2022 menunjukkan elektabilitas PDIP yaitu 25,7 persen. Berdasarkan Indikator (2023), kepuasan kinerja Jokowi berasosiasi positif dengan elektabilitas PDIP. Ini menunjukkan bahwa keduanya berhubungan erat.

Melansir *Tempo* (2024), perolehan suara PDIP pada pemilu 2019 yaitu 19,33 persen dan yang menduduki kursi pemerintahan mencapai 22,26 persen menjadikan PDIP sebagai satu-satunya partai yang memenuhi *presidential threshold*. Dengan demikian, PDIP dapat mengusung calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain pada pemilu 2024. Pada Pemilu 2024 PDIP memilih untuk berkoalisi dengan partai PPP dan Perindo dengan calon presiden Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai PDIP dan wakilnya Mahfud MD yang tidak terafiliasi partai. Meski Jokowi masih kader partai PDIP, namun Jokowi tidak menunjukkan mendukung Ganjar-Mahfud sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Jokowi justru lebih condong mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden kali 2024.

Hubungan Jokowi dan PDIP yang terlihat kurang baik cukup memengaruhi perolehan suara PDIP. Jika pada pemilu sebelumnya PDIP berhasil melewati *presidential threshold*, pada pemilu kali ini PDIP mengalami penurunan, yaitu dengan perolehan suara 16,72 persen (Farisa, 2024). Berdasarkan survei *Litbang Kompas* yang dilakukan pada Januari sampai Februari 2023, salah satu faktor yang memengaruhi pemilih dalam menentukan partai pilihan yaitu faktor ketokohan (Ramadhan & Prabowo, 2023). Salah satu tokoh besar yang menjadi faktor penentu dalam memilih partai politik adalah Presiden Jokowi. Hasil ini sejalan dengan survei indikator mengenai kepuasan kinerja presiden dan elektabilitas partai PDIP. Setelah Jokowi menunjukkan dukungan pada calon presiden lain, elektabilitas PDIP ikut menurun dan berakhir pada hasil akhir Pemilu yang turun.

c) Sosial

Analisis pada aspek sosial melihat wacana pada aspek makro, seperti sistem politik, ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Megawati beberapa kali menggunakan Bahasa Jawa dalam sambutannya di HUT ke-50 PDIP. Latar belakang Megawati yang lahir di Yogyakarta membuatnya fasih berbahasa Jawa. Respon audiens yang bertepuk tangan dan bersorak menandakan bahwa mereka memahami apa yang disampaikan oleh Megawati. Sehingga penggunaan Bahasa Jawa dalam acara PDIP bukanlah hambatan yang besar bagi para kader untuk memahami pesan yang disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara tersebut.

Pernyataan Megawati mengenai kasihan Jokowi bila tanpa PDIP tak lain karena Megawati merasa berjasa dalam pencalonan Jokowi sebagai Presiden. Salah satu syarat pencalonan Presiden yaitu diusung oleh partai

(Komisi Pemilihan Umum, 2023). Maka, jika tidak ada partai pengusung, maka seseorang tidak dapat mencalonkan diri sebagai Presiden. Partai juga berperan dalam perolehan suara melalui kampanye yang dilakukan. PDIP dikenal sebagai partai yang militan, sehingga suara partai juga berdampak pada suara yang diperoleh Jokowi. Partai ini juga dikenal sebagai partainya “*wong cilik*” sesuai dengan *branding* Jokowi yang merakyat dan suka blusukan. Meski keduanya terlihat mempunyai hubungan baik, namun sebutan “petugas partai” yang diberikan oleh Megawati membuat hubungan keduanya tampak seperti hubungan politik saja.

Perbedaan jalan politik keduanya kini makin terlihat setelah anak Jokowi maju sebagai Cawapres dan menjadi lawan paslon dari PDIP. Kini, PDIP sering mengutarakan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi. Hasto terang-terangan menyebutkan bahwa Megawati hanya berhubungan baik dengan seseorang yang menjalankan konstitusi (Syarifudin, 2024). Pernyataan ini secara tidak langsung sedang menyindir Jokowi yang menggunakan MK untuk meloloskan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden. Meski demikian, belum atau tidak ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak bahwa Jokowi telah keluar dari partai tersebut.

Sebutan “petugas partai” hingga “Pak Jokowi kalau *nggak* ada PDI Perjuangan, *duh* kasihan *dah...*” seperti teguran untuk Jokowi untuk menjalankan amanat partai. PDIP yang menyatakan sebagai partai yang menghargai demokrasi tampak tidak sejalan lagi dengan Jokowi yang menggunakan alat negara seperti Mahkamah Konstitusi untuk keperluan pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap wacana pernyataan Megawati dalam HUT ke-50 PDIP mengenai kasihan Jokowi bila tanpa PDIP, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Alat kebahasaan yang digunakan oleh megawati dalam wacana tersebut adalah diksi Saya. Wacana ini juga mengandung majas ironi melalui klausa, “Padahal Pak Jokowi kalau *nggak* ada PDI Perjuangan *aduh* kasihan *dah.*”
2. Pihak yang terlibat dalam produksi wacana meliputi media *KompasTV* yang merupakan media yang kredibel dan terpercaya. *Kompas.com* yang merupakan bagian dari media *Kompas* mengunggah pernyataan Megawati dan menyalurkannya melalui *Youtube*. Kemudian unggahan *Kompas* dikonsumsi dan mendapat beragam reaksi dari warganet.
3. Praktik sosiokultural meliputi situasional, intusional, dan sosial. Pada level situasional, wacana ini terbentuk dalam perayaan HUT ke-50 PDIP di JIEXPO kemayoran saat Megawati memberikan sambutannya sebagai Ketua Umum PDIP dan dihadiri oleh para kader, termasuk Presiden Jokowi. Institusi yang berperan dalam pembentukan wacana ini adalah PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden pada 2 periode lalu. Level sosial yang memengaruhi wacana ini yaitu keadaan budaya dan politik. Latar belakang Megawati yang merupakan orang Jawa, membuat dirinya sering menyebut kata-kata dalam Bahasa Jawa. Sedangkan faktor politik yang memengaruhi terbentuknya wacana ini karena Megawati merasa berperan dalam pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung saya dalam menyusun penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R., & Ihsanudin. (2024). *Jokowi Ingin Temui Megawati Dijemputani Sri Sultan, Ganjar: Biasanya Komunikasi Langsung*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/16261081/jokowi-ingin-temui-megawati-dijemputani-sri-sultan-ganjar-biasanya>
- Annur, C. M. (2023). *Inilah Media yang Paling Dipercaya Warga Indonesia pada 2023, Ada Favoritmu?* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/inilah-media-yang-paling-dipercaya-warga-indonesia-pada-2023-ada-favoritmu>
- Ardesaputra, A. A., & Defhany. (2024). Penerapan Etika Jurnalistik Pada Produksi Videografi Kompas Tv Riau. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(1), 246–250. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i1.1599>
- Dongoran, H. A. (2023). Adu Kuat Dua Banteng. *Tempo*, 34–35.
- DPR RI. (2008). *Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKis Group.
- Farisa, F. C. (2024a). *Bukan Cuma Jokowi dan Ganjar, Megawati Sebut Dirinya Juga Petugas Partai*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/09/15153161/bukan-cuma-jokowi-dan-ganjar-megawati-sebut-dirinya-juga-petugas-partai>
- Farisa, F. C. (2024b). *Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pilpres dan Pileg*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan*

- Umum Presiden Dan Wakil Presiden. *Komisi Pemilihan Umum, July*, 3. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu019.pdf
- Lestari, A. indri, Rahayu, N. nia, & Setiawati, R. (2022). Efektivitas Media Sosial Tiktok Terhadap Personal Branding Ganjar Pranowo Pada Masyarakat Jawa Tengah. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 2(2), 240–250. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v2i2.347>
- Mayasari, Darmayanti, N., & Riyanto, S. (2012). Analisis wacana kritis pemberitaan “Saweran untuk gedung KPK” di harian umum Media Indonesia. *Jurnal Linguistik Terapan*, 2 (02). <http://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jlt/article/view/249>
- Mayasari, & Nani Darmayanti. (2019). *ANALISIS WACANA KRITIS*.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhid, H. K. (2024). *HUT PDIP ke-51: Segini Perolehan Suara PDIP dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, Bagaimana Kans di Pemilu 2024?* <https://pemilu.tempo.co/read/1820523/hut-pdip-ke-51-segini-perolehan-suara-pdip-dari-pemilu-1999-hingga-pemilu-2019-bagaimana-kans-di-pemilu-2024>
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Keempat)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadhan, A., & Prabowo, D. (2023). *Survei Litbang “Kompas”: Tokoh Jadi Alasan Utama Memilih dan Tidak Memilih Partai*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/07472081/survei-litbang-kompas-tokoh-jadi-alasan-utama-memilih-dan-tidak-memilih?page=all>.
- Ramadhan, A., & Setuningsih, N. (2023). *Jokowi Restui sang Jadi Ketua Umum PSI*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/26/18330411/jokowi-restui-kaesang-jadi-ketua-umum-psi>
- Syarifudin, T. (2024). *Hasto Jelaskan Hubungan Terkini Jokowi dan Megawati*. DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7371859/hasto-jelaskan-hubungan-terkini-jokowi-dan-megawati>
- Wismabrata, M. (2014). *Megawati: Jokowi Petugas Partai yang Saya Perintah Jadi Capres*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2014/04/05/1719285/Megawati.Jokowi.Petugas.Partai.yang.Saya.Perintah.Jadi.Capres>.